



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan
Pertambangan Tahun 2009-2018
Studi Kasus: Newmont Mining Corporation

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Nydia Anjani Rochadi

2016330009

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan
Pertambangan Tahun 2009-2018
Studi Kasus: Newmont Mining Corporation

Skripsi

Oleh

Nydia Anjani Rochadi

2016330009

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan
Pertambangan Tahun 2009-2018
Studi Kasus: Newmont Mining Corporation

Skripsi

Oleh

Nydia Anjani Rochadi

2016330009

Pembimbing

Sapta Dwikardana M.SI., Ph.D.

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nydia Anjani Rochadi
Nomor Pokok : 2016330009
Judul : Dinamika Ekonomi-Politik dan Kebijakan Pertambanagn 2009-2018.
Studi Kasus: Newmont Corporation

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 08 Januari 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

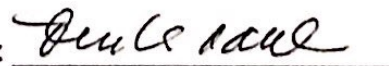
Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan, S.IP., M.A

: 

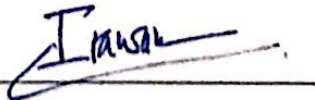
Sekretaris

Sapta Dwikardana M.SI., Ph.D.

: 

Anggota

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto H.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nydia Anjani Rochadi

NPM : 2016330009

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan

Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining Corporation

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulisan ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Desember 2019



Nydia Anjani Rochadi

ABSTRAK

Nama : Nydia Anjani
NPM : 2016330009
Judul : Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan
Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining
Corporation

Kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang dinamis menyebabkan inkonsistensi kebijakan pertambangan pada tahun 2009-2018 dan berpengaruh terhadap kinerja PT Newmont Nusa Tenggara yang merupakan perusahaan *joint venture* dari Newmont Mining Corporation. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian penulis adalah **“Bagaimana faktor ekonomi dan politik Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation?”**. Untuk meneliti skripsi ini, penulis menggunakan Teori Pembangunan, Teori Analisa Kebijakan dan konsep-konsep: *FDI*, *OLI* dan *MNC*. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Temuan utama yang penulis dapat adalah kebijakan pertambangan 2009-2018 yang tidak konsisten dari UU/4/2009 beserta PP turunannya mengenai pelarangan ekspor mineral mentah dan batas waktu pembangunan teknologi *smelter* tidak jelas keberpihakannya dan menyebabkan Newmont memutuskan kerjasamanya dengan Pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Inkonsistensi pemerintah dalam membentuk kebijakan tambang membuat Indonesia kesulitan menerima investasi asing berskala besar.

Kata Kunci: KK 1967, UU/4/2009, Ekonomi dan Politik Indonesia, Pembangunan Ekonomi, *FDI*, Newmont Corporation, PT NNT

ABSTRACT

Name : Nydia Anjani
Student ID : 2016330009
Title : *The Dynamic of Indonesia's Economic-Political and Mining Policies in 2009-2018. Study Case: Newmont Mining Corporation*

*The dynamics of Indonesia's economic and political condition caused inconsistency of mining policies in 2009-2018 and affected the performance of PT Newmont Nusa Tenggara as a joint venture company under Newmont Mining Corporation. Therefore, the research question is: “**How Indonesia's Economic and political factors encouraged the Government of Indonesia to conduct mining policies in 2009-2018 that is inconsistent, and leads to the decreased performances of Newmont Mining Corporation?**”. In this research, the writer used Development Theory, Public Policy Analysis Theory and concepts: FDI, OLI and MNC. The writer used the descriptive-qualitative research methods through study case. This research finds that the inconsistent Indonesia's mining policies in 2009-2018 based on UU/4/2009 and the government regulations about the restriction of raw mineral exports and deadlines for constructing smelter technology has an uncertain side and caused Newmont Mining Corporation to end the cooperation with Indonesia's Government in 2016. The government inconsistencies on making mining policies leads to Indonesia's hardship to earn foreign investments in a large scale.*

Keywords: *KK 1967, UU/4/2009, Indonesia's Economic and Political, Economic Development, FDI, Newmont Corporation, PT NNT*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk menulis tugas akhir ini dengan tepat waktu. Penelitian ini membahas mengenai cara pemerintah mengimplementasikan kebijakan pada sektor pertambangan tahun 2009-2018 yang berakibat pada penurunan kinerja Newmont Corporation dalam pengoperasiannya di PT Newmont Nusa Tenggara, Batu Hijau Sumbawa. Setelah kebijakan pertambangan UU Nomor 4 Tahun 2009 dibentuk, hal ini memunculkan polemik antara pemerintah dengan perusahaan tambang karena kebijakan ini berubah drastis dibandingkan dengan Kontrak Karya 1967 yang sudah di tanda tangan sejak awal. UU Nomor 4 Tahun 2009 tak hanya memberikan kerugian terhadap perusahaan tambang, tetapi juga memberikan ketidakjelasan kebijakan. Karena, selama 9 tahun sejak 2009-2018 kebijakan ini di amandemen sebanyak 5 kali yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik pada saat itu. Temuan penelitian ini harapannya dapat berguna sebagai studi contoh kasus dari kebijakan yang dipengaruhi ekonomi dan politik.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Sapta Dwikardana M.SI., Ph. D selaku dosen pembimbing penulis, yang sudah bersedia memberikan nasehat dan arahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga masukan, kritik dan pertanyaan selalu terbuka untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Tempat saya memohon, meneduh serta meminta ketenangan. Terimakasih atas rahmat dan karunia-Mu sehingga saya selalu mensyukuri kehidupan ini.

Kepada Keluarga Tercinta,

Untuk Yangdeku tersayang, untuk selama 3,5 penuh saya diberikan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang enak serta kasih sayang yang sangat dalam. Terima kasih Mama, Papa dan Mas Ica, yang selalu memberikan dukungan penuh, mengajarkan arti hidup dan yang selalu membahagiakan saya. Terimakasih Nenek, yang selalu memberikan doa dan dukungan, banyak memberikan ilmu dan masukan dan mengenalkan kepada hal baru. Terima kasih Yang Ono dan Inyiek, yang selalu memberikan inspirasi semasa hidupnya. Untuk Eyang Martiono, selaku anggota keluarga yang saya sayangi serta narasumber dari PT Newmont Nusa Tenggara.

Kepada Dosen HI dan Staff FISIP Unpar

Terima kasih untuk Mas Sapta yang telah menuntun, memberikan masukan serta saran selama penulisan skripsi. Terima Kasih untuk Mas Apres yang sudah membantu saya dalam berbagai hal dan banyak menginspirasi. Untuk Bang Tian, Mas Andre dan Mba Cucu yang sudah mempercayakan saya dalam memimpin SIAP dan BAKDES 2019 dan juga selalu membantu dalam menghadapi kesulitan.

Para sahabat dan kolega yang selalu hadir baik di saat sedih maupun senang

Kepada Para Sahabat Tersayang,

Issul, Etta, Hani, Affi, Rangga, Ferry, Kanya, Nabskoy, Kiko, Tito, Tristan, Alvar, Farrel, Cule, Shella, Vio, Angel, Ivana, Noel, Marika, Andana, Nadia, Stella dan lainnya yang belum sempat ditulis. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam kehidupan selama perkuliahan saya

Inti SIAP 2019,

Ferry, Jorji dan Shofi yang selalu ada baik di masa senang maupun sulit. Terimakasih sudah menerima posisi serta berkomitmen penuh dalam pelaksanaan SIAP 2019. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin dan semoga pertemanan kita tidak pernah putus.

Ring 1 HMPSIHI,

Kenken, Ferry, Bella, Kathleen, Stella, Kezia, Cheryl, Cahyadi, Vindi, Etta, Yudha, Jelny, Cindy, Ezra, Aufar. Terima kasih satu periode yang telah kita lalui bersama dan atas pelajaran berharga. Sukses terus kedepannya.

Humas HMPSIHI 18-19,

Rangga, Jordan, Jhon, Ribka, Inoi, Rama dan Afi yang selalu memberikan canda tawa dan mengurangi rasa penat dalam menghadapi pekerjaan Humas yang sangat sibuk. Untuk anak-anakku, terus kembangkan potensi kalian dan menjadi lebih baik.

The Delegation of French Republic,

Sherin, Nadilla, Ezarella, Hani, Reina, Icil, Nuti, Ayas, Anne, Etta. Terima kasih para delegasi flower power yang cantik, baik hati dan menyenangkan. Sukses selalu dalam menggapai karier kalian masing-masing dan sampai jumpa di temu arisan.

Sahabat Logistik 15, 16 dan 17,

Terimakasih divisi mobilitas tinggi dan semangat tinggi! Terimakasih sudah memberikan warna lain dari kehidupan perkuliahan saya, tawa, canda dan mengajarkan arti solidaritas. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses.

Dan untuk Alm. Aghiya Krisna, yang tenang, *Ghi*. Terima kasih sudah menjadi sosok kakak dan teman yang baik bagi orang-orang sekitar.

Keluarga MCK,

Nando, Carol, Ferry, Ruth dan Obi terima kasih sudah mewarnai Hari Senin di Semester 5 menjadi jauh lebih menyenangkan dan juga di saat-saat lainnya. Semoga cita-cita kalian tercapai.

Angkatan 15,

Untuk Nindyo, sosok kakak, sahabat dan tempat bercerita serta orang yang sudah memberikan banyak pelajaran, khususnya di ruang lingkup perkuliahan. Valen, Opuy dan Elsa sebagai swasta Humas yang selalu saya hormati dan sayangi, terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diajarkan. Bom dan Bri, sebagai sosok mentor yang selalu membantu baik secara lisan maupun tindakan khususnya di masa-masa persiapan SIAP FISIP 2019. Anya, mentor dan sahabat di masa awal perkuliahan saya yang selalu memberikan dukungan serta saran-saran selama memasuki dunia perkuliahan. Darryl, terima kasih telah ikut mewarnai dan melepas penat saya di hari-hari semester pendek.

Angkatan 17,

Chika dan Matthew, adik-adik yang sudah banyak membantu dan tentunya juga selalu memberikan tawa dan canda.

Kepada Keluarga Arromanis,

Teman kerja sekaligus sahabat yang juga membantu menyemangati selama penulisan skripsi.

Kepada Sahabat-Sahabat di Luar Unpar,

Untuk Tania Ternita, Savira Nasution yang selalu menyemangati serta mendengarkan keluh kesah saya selama proses penulisan skripsi. Nelsha Meutia, Aliya Natania dan Dita Dewanti sebagai teman-teman yang selalu membuat saya rindu akan kekonyolan kalian. Arumadanti Poerwanto, yang sudah menemani penulis latihan presentasi sidang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2 Kegunaan Penelitian	10
1.5 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1 Kajian Literatur	11
1.5.2 Kerangka Pemikiran	16
1.6 Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	25
1.6.1 Metode Penelitian	25
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.7 Sistematika Pembahasan	26
BAB II FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TAHUN 2009-2018	28
2.1. Dinamika Ekonomi dan Politik Indonesia	29
2.1.1 Ekonomi dan Politik Indonesia pada Masa Orde Baru (1960-1999) ...	30
2.1.2 Ekonomi dan Politik Indonesia pada Masa Reformasi (1999-2004) ...	34
2.1.3 Ekonomi dan Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan SBY (2004- 2014)	35
2.1.4. Ekonomi dan Politik Indonesia pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (2014-2018).....	39

2.2 Masuknya Pertambangan di Indonesia	43
2.2.1 Newmont Mining Corporation di Indonesia	47
2.2.2 Hubungan Newmont Mining Corporation dengan Pemerintah Indonesia	53
2.2.3 Tekanan Masyarakat Sumbawa Perihal Aktivitas PT NNT.....	56
BAB III DINAMIKA KEBIJAKAN PERTAMBANGAN TAHUN 2009-2018 TERHADAP KINERJA NEWMONT MINING CORPORATION DI PT NEWMONT NUSA TENGGARA.....	61
3.1 Kebijakan Pertambangan Indonesia 2009-2018	63
3.1.1 UU Nomor 4 Tahun 2009	65
3.2 Penerapan Kebijakan Pertambangan 2009-2018	72
3.3 Dampak Kebijakan Pertambangan 2009-2018 Terhadap Kinerja PT NNT	75
BAB IV KESIMPULAN	84
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2008-2018).....	43
Grafik 2.2	Pola Pertumbuhan 10 Tahunan PDB Sektor Pertambangan	45
Grafik 2.3	Produksi Mineral PT NNT (2000-2010)	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDB (2000-2007).....	45
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDB (2007-2014).....	46
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan PDB (2014-2018).....	46
Tabel 2.4	Produksi Mineral PT NNT (2011-2014).....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Proses Analisa Kebijakan Publik.....	65
Gambar 3.2	Hierarki Kerangka Hukum Pertambangan Minerba.....	74

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
<i>BIT</i>	: <i>Bilateral Investment Treaties</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
<i>CSR</i>	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
<i>FDI</i>	: <i>Foreign Direct Investment</i>
<i>IMF</i>	: <i>International Monetary Fund</i>
KK	: Kontrak Karya
Minerba	: Mineral dan Batu Bara
<i>MNC</i>	: <i>Multi-National Corporation</i>
<i>OLI</i>	: <i>Ownership, Localization, Internationalization</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah
PHK	: Pemberhentian Hubungan Kerja
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
PT NNT	: PT Newmont Nusa Tenggara
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
<i>USD</i>	: <i>United States Dollar</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada wilayah tertentu yang merupakan lintasan pegunungan api, sejatinya dapat menghasilkan hasil perut bumi seperti emas, tembaga, perak dan jenis hasil tambang lainnya. Sama halnya seperti Indonesia yang dilintasi oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania dengan total pegunungan sebanyak 129 buah. Hasil produksi emas dan tembaga di Indonesia menduduki peringkat ke-6 dan 10,4 di dunia.¹ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi mineral yang luar biasa dan memiliki nilai ekonomi. Tak jarang hasil perut bumi di Indonesia digunakan untuk memikat para investor asing. Meskipun penanaman modal di negara membuahkan keuntungan untuk kedua belah pihak bagi Indonesia maupun investor asing, investor tidak serta merta diizinkan untuk langsung beroperasi melainkan diwajibkan untuk mematuhi regulasi serta syarat-syarat tertentu.

Setelah kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia sebagai negara dunia ketiga masih memerlukan usaha keras untuk bersaing dalam perekonomian dunia.

¹ Maria Contesa. Sintaningrum. Mudiwati R, "Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan Dampak di Indonesia", Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, 2018, Hal. 1, <http://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/19095/8924>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

Sebagai negara Undang-Undang, seluruh masyarakat Indonesia wajib mematuhi regulasi sesuai dengan rancangan Undang-Undang dari segala aspek. Kesulitan Indonesia menghadapi perekonomian dunia terus menerus berkala mulai dari pemerintahan Soekarno hingga Jokowi. Dengan begitu, Indonesia harus siap untuk mendongkrak permasalahan yang diangkat dan mencari solusi sesuai dengan Undang-Undang negara. Tidak jarang peraturan atau kebijakan Indonesia diubah sesuai dengan kondisi domestik yang sedang berlangsung.

Terkait dengan dunia pertambangan, Indonesia telah membentuk regulasi yang membatasi aksi investor asing dengan tujuan memakmurkan masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan internasional diberlakukan sejak masa pemerintahan Soeharto, ketika kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami hiperinflasi. Kondisi ekonomi seperti ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memikirkan strategi atau langkah politik yang mampu membantu meningkatkan jumlah ekspor, salah satunya untuk meningkatkan ekspor pada hasil tambang yang diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia yang sedang jatuh.²

Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, Indonesia dilimpahi perusahaan-perusahaan asing yang bersedia membantu ekspor tambang Indonesia, salah satunya adalah Newmont Mining Corporation, perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Di Indonesia, Newmont membangun anak perusahaannya yang bernama PT Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di Minahasa dan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa. Selama beroperasi, kinerja perusahaan-

² *Ibid.*

perusahaan dibawah Newmont Corporation mengikuti dinamika kebijakan-kebijakan Indonesia yang terus diperbaharui sejak 2 Desember 1986, yaitu tahun dimulainya kerjasama Newmont Corporation dengan Indonesia. Secara komersil, Newmont Corporation melakukan kegiatan pengerukan dan ekspor hasil tambang melalui PT Newmont Nusa Tenggara dimulai sejak tahun 2000.³

KK tahun 1967 kemudian diperketat dengan diberlakukannya Undang-Undang yang mengatur Mineral dan Batu Bara yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009, berisi larangan ekspor mineral mentah dengan membangun pabrik peleburan atau *smelter* yang juga berguna untuk meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, hingga tahun 2018 setelah diberlakukannya UU Minerba pada tahun 2009 yang ditegaskan kembali dalam PP Nomor 23 Tahun 2010, ternyata PP sudah dilakukan amandemen sebanyak 5 kali. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dari pemerintah Indonesia karena selama 9 tahun, peraturan pertambangan, khususnya pada batas waktu pembangunan *smelter* terus berubah. Dalam hal ini, inkonsistensi kebijakan pertambangan mengakibatkan para perusahaan tambang malas bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia.⁴ Untuk itu, penulis akan membahas mengenai Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining Corporation.

³ Tempo.Co, “NTB Tagih MoU Newmont-ESDM”, <https://nasional.tempo.co/read/605067/ntb-tagih-mou-newmont-esdm>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

⁴ *Op.cit.*

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Kondisi domestik yang dinamis menjadi faktor dimana kebijakan pertambangan Indonesia yang diperbaharui selama perusahaan asing masih melakukan operasinya di Indonesia. Newmont Mining Corporation sebagai salah satu perusahaan tambang raksasa terbesar dan terlama di Indonesia telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melewati periode-periode masa pemerintahan Indonesia, banyak tantangan-tantangan yang bersifat ekonomi dan politik menantang perusahaan-perusahaan tambang menghadapi perubahan harga maupun jumlah ekspor dan juga pemerintah sebagai pemegang hak atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Banyaknya tantangan bersifat ekonomi maupun politik di Indonesia mengakibatkan perubahan-perubahan pada kebijakan yang sudah ditetapkan.

Hasil dari Kontrak Karya tahun 1967 dan krisis ekonomi Indonesia yang jatuh pada tahun 1998 merupakan awal mula terbukanya pintu luas untuk perusahaan-perusahaan pertambangan yang berinvestasi di Indonesia. Kelonggaran-kelonggaran ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan ekonomi di Indonesia. Situasi yang menguntungkan dimana sektor pertambangan Indonesia dijadikan salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan negara, namun juga dibutuhkan kejelian dari pembentuk regulasi untuk menghindari permasalahan berdampak besar.⁵

⁵ Kontan: Liputan Khusus Freeport, "Karpas Merah Kontrak Karya dari Rezim Orba", <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpas-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba->, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

Di masa pemerintahan Presiden Habibie, ia memutuskan peningkatan produksi tambang melalui kontrol perusahaan-perusahaan raksasa seperti Newmont dan Freeport. Hal ini tak lain digunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, cetak tunai dan membuka lapangan pekerjaan. Meskipun kecaman terus berdatangan dari masyarakat, pemerintah bersih keras untuk melonggarkan regulasi terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Situasi ini menjadi kesempatan bagi Newmont untuk memaksimalkan garapannya yang kemudian di ekspor dimana ketika harga tambang rendah, maka profit yang didapat dapat lebih maksimal.⁶ Dilonggarkannya kebijakan pertambangan pada perusahaan-perusahaan tambang merupakan awal mula dari ketidakpastian pemerintah dalam menyajikan kebijakan, yang semata-mata hanya demi memikirkan pertumbuhan ekonomi tanpa mengkalkulasikan efek sampingnya.

Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), peraturan pada pertambangan bergeser sangat drastis apabila dibandingkan dari masa pemerintahan Presiden Habibie. Kondisi ekonomi di Indonesia dapat dikatakan relatif stabil, namun pada tahun 2009 perekonomian melambat yang mana merupakan akibat dari krisis global pada tahun 2008. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain juga merasakan dampak dari krisis finansial ini yang disebabkan karena The Fed sebagai Bank Sentral Amerika yang meningkatkan suku bunga sehingga menyebabkan harga komoditas global melonjak. Meskipun begitu, Indonesia menangani hal ini dengan baik dengan meningkatkan jumlah

⁶ Down to Earth, "Raksasa Tambang Beruntung karena Krismon", <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/39imi.htm>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

ekspor walaupun masih dikalahkan jumlah impor. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini masih termasuk cepat.⁷

Sebagai Presiden Petahana di Indonesia, masa pemerintahan SBY mengalami banyak pergeseran ekonomi, salah satu solusinya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor. Masa pemerintahan ini juga merupakan salah satu pemerintahan yang paling signifikan dalam mengatur dunia pertambangan Indonesia. Akibatnya, harga tambang menjadi elastis dimana pada tahun 2008 sangat rendah, kemudian pada tahun 2009 meningkat.⁸ Mengusung strategi pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat, pemerintah memperketat regulasi pertambangan dengan dibentuknya UU Nomor 4 Tahun 2009 dan ditegaskan kembali dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagai terobosan penguasaan tambang Indonesia. Pada akhirnya peraturan ini dipertegas dalam pengoperasiannya di Batu Hijau, dimana Newmont diwajibkan untuk membangun *smelter* yang dengan tujuan meningkatkan nilai ekonomi dari hasil tambang tersebut dan membuka lapangan pekerjaan.⁹

Memasuki pemerintahan Jokowi (2014-sekarang), ia berambisi untuk melakukan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan memfokuskan pada investasi dan membangun infrastruktur. Namun, pertumbuhan ekonomi periode Jokowi tetap berada dibawah pimpinan SBY dan harga rupiah

⁷ Kompas.com, “Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa”, <https://ekonomi.kompas.com/jeo/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

⁸ Publish What You Pay Indonesia, “Tambang Batu Hijau, Indonesia – Laporan Naratif”, https://pwyvindonesia.org/wp-content/uploads/2016/11/Narrative-Summary_Batu-Hijau_Indonesia-Bahasa.pdf, diakses pada tanggal 10 September 2019.

⁹ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.HTM>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

pun terus melemah dari mata uang dollar AS.¹⁰ Meskipun begitu, pada masa pemerintahan Jokowi pemerintah pun tetap bersikeras merebut kembali aset negara dengan dilanjutkannya divestasi terutama pada perusahaan tambang raksasa seperti Newmont. Pada tahun 2018, saham Newmont sebesar 82% direbut kembali yang mana dibeli oleh Medco Energy Indonesia.¹¹

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masa pemerintahan Indonesia memberikan berbagai dampak bagi pengoperasian penambangan oleh Newmont Corporation yang dikerjakan di Batu Hijau, Sumbawa, khususnya sejak tahun 2009. Masa-masa paling krusial dialami oleh Newmont Corporation di Indonesia adalah ketika dipimpin oleh SBY dan Jokowi. Sebelumnya, Newmont sudah memiliki masalah dengan Indonesia perihal aturan divestasi yang tidak kunjung dibayar oleh pihak Newmont, hingga terseret pada arbitrase internasional.

Setelah diberlakukannya regulasi UU Nomor 4 Tahun 2009, produksi tambang Newmont di Batu Hijau, Sumbawa semakin melambat dan aktivitas pekerja menurun. Hal ini disebabkan karena pelarangan ekspor mineral mentah pada UU Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas dalam PP Nomor 23 Tahun 2010 membuat pihak Newmont marah dan menggugat Pemerintah Indonesia dalam arbitrase internasional. Namun pada kenyataannya, hanya dalam

¹⁰ Kompas.com, "Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa", <https://ekonomi.kompas.com/jeo/jejak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹¹ Kompas.com, "Mengurai Transparansi Hasil Divestasi Saham PT Newmont", <https://regional.kompas.com/read/2018/01/30/23501101/mengurai-transparansi-hasil-divestasi-saham-pt-newmont>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

waktu 9 tahun sejak tahun 2009 hingga tahun 2018, Peraturan Pemerintah telah diamandemen sebanyak 5 kali. Melihat peraturan yang terus menerus direvisi dan seharusnya digunakan untuk mempertegas peraturan terhadap Newmont melalui pelarangan ekspor mineral mentah dan pemberian batas waktu pembangunan *smelter*, kedua belah pihak saling setuju untuk mencabut gugatannya, sehingga batasan waktu untuk pembangunan *smelter* terus diundur.¹²

Bisman Bakhtiar selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP) mengatakan bahwa pengaturan tata kelola terhadap SDA di Indonesia sudah tidak sesuai dengan konstruksi hukum yang sesuai. Bahkan, aturan pelaksanaan bisa menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan UU yang mengatur tentang Mineral dan Batu Bara.¹³ Pernyataan tersebut menjelaskan pengakuan salah satu aparat negara yang menyetujui bahwa konsistensi pengaturan kebijakan Mineral dan Batu Bara di Indonesia sangat minim.

Di luar kegiatan ekspor Newmont Corporation, perusahaan yang terikat pada kontrak Indonesia harus menyesuaikan kinerja dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan kebijakan pertambangan sejak Kontrak Karya 1967 hingga saat ini sangat drastis. Lebih lanjut, diberlakukannya penegasan pemerintah dari UU Nomor 4 Tahun 2009 yaitu untuk pembangunan *smelter*, terlihat unsur-unsur intrik yang menunjukkan kurang tegasnya

¹² Medcom.id, “Pemerintah Setuju Pencabutan Gugatan Arbitrase Newmont”, <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/4KZe2ewk-pemerintah-setuju-pencabutan-gugatan-arbitrase-newmont>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹³ Hukum Online, “Membongkar Kerancuan Regulasi Minerba di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58cf8ccc54b2d/membongkar-kerancuan-regulasi-minerba-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

pemerintah dalam mengatur perundang-undangan tambang Indonesia, misalnya renegotiasi kepada pihak Newmont untuk kembali beroperasi. Dalam diskusi ekonomi, Suwandi Miharja sebagai Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang menyatakan bahwa inkonsistensi dari UU Nomor 4 Tahun 2009 merupakan akar masalah pada sektor pertambangan dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah lainnya.¹⁴

Hingga saat ini, belum ditemukan regulasi yang kuat dan jelas untuk memperbaiki seluruh peraturan, khususnya pada investor asing. Perbedaan perspektif antara pengusaha dan pemerintah Indonesia juga semakin besar, sehingga tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing yang lelah untuk bekerjasama dengan Indonesia. Di satu sisi, perusahaan asing ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Di lain sisi, walau Indonesia masih dikatakan sebagai negara berkembang yang membutuhkan bantuan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, Indonesia merupakan negara berdaulat yang bersikeras tidak ingin kedaulatannya ternodai, salah satunya adalah pada kepemilikan terhadap tambang.¹⁵ Kini Newmont sudah tidak lagi beroperasi di Batu Hijau dan sudah sepenuhnya dibeli oleh Medco Energy. Sejak diberlakukan UU No. 4 Tahun 2009 secara berangsur-angsur kinerja Newmont Corporation semakin menurun. Hubungan Indonesia dengan Newmont Corporation seakan-akan seperti

¹⁴ CNN Indonesia, "Inkonsistensi Regulasi jadi Masalah Utama Industri Tambang", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161109143622-85-171469/inkonsistensi-regulasi-jadi-masalah-utama-industri-tambang>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

¹⁵ Voa Indonesia, "Indonesia Gali Lubang Sendiri dengan UU Pertambangan Baru", <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gali-lubang-sendiri-dengan-uu-pertambangan-baru/1517891.html>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

tarik ulur dimana Indonesia mepertegas aturan terhadap perusahaan ini tetapi tidak ingin Newmont lepas dari genggaman Indonesia ketika gugatan arbitrase internasional pada tahun 2014 telah dicabut.

1.3 Perumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka timbul pertanyaan penelitian yang menjadi acuan utama dari penelitian ini adalah **“Bagaimana faktor ekonomi dan politik Indonesia mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation?”**

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian : Menjelaskan faktor ekonomi dan politik Indonesia yang mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian : Sebagai syarat kelulusan dan salah satu referensi maupun acuan untuk kepentingan akademisi dalam melihat permasalahan pertambangan di Indonesia melalui studi kasus kerjasama Newmont dengan Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kajian Literatur

Penulisan ini menjelaskan faktor ekonomi dan politik pada tahun 2009-2018 yang mendorong Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pertambangan yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja Newmont Corporation. Selama 16 tahun Newmont Mining Corporation memberikan kontribusinya dalam sektor pertambangan Indonesia dengan menyuntikkan sebagian besar saham pada PT Newmont Nusa Tenggara. Namun, Newmont dan perusahaan tambang asing lainnya seringkali mendapatkan rintangan yaitu ketidakpastian pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tambang. Hal ini membuat ketegangan di antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan tambang asing.

Referensi pertama adalah jurnal yang berjudul Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan karya Sandy Pratama yang menjelaskan mengenai tatakelola dan tata niaga pertimahan di Indonesia. Semenjak Orde Baru, Indonesia bergantung kepada perusahaan-perusahaan swasta sehingga diberlakukannya liberalisasi atau kelonggaran terhadap perusahaan swasta tanpa memperkirakan efek jangka panjang terhadap kebijakan negara. Jurnal ini memfokuskan pada timah sebagai bahan tambang dan juga ekosistem laut atau tempat nelayan mencari nafkah sebagai gambaran keadaan lingkungan sekitar daerah tambang. Yang menjadi permasalahan utama dalam pengaturan kebijakan pertambangan adalah dimana kebijakan-kebijakan ini tidak jarang berbenturan kepentingan para penguasa hanya disebabkan oleh motif individu. Sehingga,

perlunya konsistensi, kekuatan hukum serta politik yang lebih kokoh bagi para penguasa untuk menempa pembangunan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat Indonesia. Penting dalam dunia pertambangan untuk memperhatikan kajian zonasi, daya dukung tampung, valuasi ekonomi antar sektor dan tidak hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.

Apabila dikaitkan dengan jurnal ini, kurang lebih permasalahan yang dialami hampir sama di sektor pertambangan, dan akar permasalahannya pun sama yang berasal dari liberalisasi pertambangan, yaitu memberikan kelonggaran terhadap perusahaan-perusahaan asing. Dalam hal ini Indonesia masih terlihat tidak konsisten dalam pengaturan kebijakan pertambangan karena masih banyak hal yang berbenturan dengan aspek lainnya. Sehingga, yang merasakan dampak dari hasil pengimplementasian kebijakan pertambangan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan tambang yang bekerjasama dengan Indonesia, tetapi juga masyarakat Indonesia yang terutama yang tinggal di daerah sekitar wilayah pertambangan. Jurnal ini menyarankan agar pemerintah Indonesia memperhatikan detail-detail ketika membentuk kebijakan seperti kajian zonasi, daya dukung tampung dan tidak hanya memperhatikan keuntungan pihak kerjasama saja tetapi juga untuk rakyat.¹⁶

Jurnal kedua yang berjudul *Role of FDI in Developing Countries: Basic Concepts and Facts* menjelaskan mengenai sebuah pencapaian bagi negara-negara di Asia Tenggara dalam mengeksploitasi investasi asing, khususnya pada tahun

¹⁶ Sandy Pratama, "Dimensi Ekonomi Politik dalam Dunia Pertambangan", Vol 3. No 1 Tahun 2018.

1990-an. Penanaman investasi asing di negara-negara berkembang merupakan sebuah kesempatan untuk mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi dan secara berkala dapat bersaing dengan negara lainnya untuk menarik para investor asing. Dalam negara berkembang, masalah yang terjadi biasanya adalah minimnya produktifitas yang menjurus pada minimnya upah, sehingga investasi merupakan terobosan untuk meninggalkan ketertinggalan negara-negara berkembang. Investasi asing digunakan oleh negara berkembang juga sebagai tabungan negara, akses teknologi secara internasional, meningkatkan efisiensi dan memperluas arus keluar sehingga dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁷

Sektor pertambangan menjadi sandaran bagi perekonomian di Indonesia, dimana usaha ini mampu memberikan PDRB pada Indonesia dengan jumlah yang signifikan. Jurnal dengan judul “Kebijakan Pertambangan: Regulasi untuk siapa?” mempertanyakan dan memberikan berbagai perspektif perihal manfaat yang dapat diberikan dari pengelolaan pertambangan di Indonesia dalam aspek kesejahteraan masyarakat Indonesia. Keterlibatan negara dalam perekonomian domestik tak lain untuk menghindari kegagalan pasar. Sehingga, ketika kebijakan dibentuk dalam rangka menghindari kegagalan pasar, munculah pertanyaan untuk siapakah kebijakan negara pada perekonomian negara? *State centered* atau *society*

¹⁷ Chaudhuri. Sarbajit, Mukhopadhyay. Ujjaini, “Role of FDI in Developing Countries: Basic Concepts and Facts”, University of Calcutta, Behala College, 10.1007/978-81-322-1898-2_2, (2014), https://www.researchgate.net/publication/300251508_Role_of_FDI_in_Developing_Countries_Basic_Concepts_and_Facts, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

centered? Penulisan ini membawa diskusi yang disesuaikan dengan kondisi faktual Indonesia.¹⁸

Pertama ada perspektif negara kesejahteraan, dimana industrialisasi dijadikan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang menganut konstitusi 1945 dengan poin menyejahterakan masyarakat, didukung dengan kegiatan industrialisasi pada masa Orde Baru. Berdasarkan pandangan Flora (1986) terdapat dua dimensi infrastruktur institusional yaitu, i) tingkat penetrasi negara pada institusi kesejahteraan dan ii) tingkat diferensiasi refleksi sosial dari institusi kesejahteraan. Kedua, perspektif dominasi negara (*state centered*) yang melibatkan peran negara dalam perekonomian. Ketiga, perspektif ekonomi politik yang menekankan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat yang dapat melibatkan aktor lain di luar negara. Perspektif ketiga ini juga berkaitan dengan teori ekonomi Neo-Klasik yang memahami subsistem sosial, yaitu subsistem politik dengan ekonomi.¹⁹

Keempat, kerangka regulasi perusahaan pertambangan Indonesia. Regulasi pertambangan di Indonesia sudah ditetapkan melalui UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kemudian dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 2009. Sehingga, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dikhususkan dalam pembuatan regulasi mengenai sumber daya alam. Dalam analisa mengenai perspektif *state centered* merupakan komparasi kondisi faktual

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*.

berupa kepentingan antar negara dan swasta pada regulasi berdasarkan indikator *concern, assumption, regulation* dan *role of state*. Sedangkan, inkonsistensi regulasi pertambangan Indonesia menjelaskan bahwa adanya konsep *clientelistic* sebagai kebijakan yang mendukung klien untuk tetap mengikuti rezim pemerintah.

Misalnya dalam kasus pertambangan, BUMN bergerak dalam bidang pertambangan cenderung menjadi pengeruk uang untuk kepentingan bersama. Namun, konsep *clientelistic* dimana keberpihakan pada klien agar tetap mendukung regulasi di Indonesia masih terlalu memihak pada klien. Sehingga, Indonesia cenderung mengikuti kemauan klien dibandingkan menegaskan regulasi untuk pihak MNC. Jurnal ini memperlihatkan dilematis bagi sektor pertambangan melalui kebijakan sektor pertambangan yang menunjukkan inkonsistensinya terhadap pengusaha. Inkonsistensi negara ini mengakibatkan semakin lemahnya suatu negara dan sulit untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya.²⁰

Jurnal ketiga yang berjudul *The Economic Journal: The Take-Off Into Self Sustained Growth* karya Rostow menjelaskan bagaimana negara *take-off* bisa menjadi negara yang berkembang dengan sendirinya. Dalam jurnalnya dijelaskan bahwa kondisi negara *Take-off* masih berada dalam tahap perencanaan untuk merubah nasib negara dalam dua hingga tiga dekade. Perubahan ini meliputi kondisi sosial dan ekonomi yang akan bertransformasi. Untuk menghadapi perubahan ini, negara membutuhkan investasi lebih banyak yang merubah teknik

²⁰ Said. Moh, "Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)", JIAP Vol. 3, No. 3, pp 184-190, ISSN 2302-2698, (2017) file:///Users/premiereshouse/Downloads/719-2685-1-PB.pdf, diakses pada tanggal 26 Maret 2019

produksi dan alur pendapatan sehingga dapat mempengaruhi pendapat perkapita. Kelompok-kelompok berkuasa diwajibkan untuk membawakan dampak positif dari luar. Teori ini juga membutuhkan perubahan secara institusional, politik dan ekonomi agar lebih inovatif setelah menerima investasi dari luar.²¹

Dalam kasus ini Indonesia digambarkan sebagai negara *Take-off* yang masih membutuhkan bantuan perusahaan asing untuk merubah nasib sosial dan ekonomi negara, mulai dari bantuan teknik produksi, alur pendapatan dan juga memperoleh teknologi dalam mengelola hasil tambang Indonesia. Newmont Corporation sebagai salah satu perusahaan tambang raksasa memberikan investasi salah satunya di Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara. Peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan untuk mengontrol perusahaan ini untuk menyerap potensi yang positif dan menghindari potensi negatif yang akan ditimbulkan. Pemerintah diharapkan memberikan pengaruh terhadap negaranya agar dapat menerima perubahan-perubahan dari suntikan investasi, tentunya untuk meningkatkan inovasi negara.²²

1.5.2 Kerangka Pemikiran

Topik Dinamika Kondisi Domestik Indonesia Tahun 2009-2018 Mendorong Kebijakan Pertambangan dalam Mempengaruhi Kinerja Newmont Corporation, Amerika Serikat merupakan salah satu isu Hubungan Internasional yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan keberlangsungan sektor

²¹ W. W. Rostow, *The Take-Off Into Self-Sustained Growth*, *The Economic Journal*, Volume 66, Issue 261, 1 March 1956, Pages 25, <https://doi.org/10.2307/2227401>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

²² *Ibid.*

pertambangan Indonesia saat ini. Newmont Mining Corporation sebagai salah satu MNC melakukan interaksi langsung dengan pemerintah Indonesia melalui perjanjian Kontrak Karya yang disepakati pada tahun 1986. Selama di Indonesia, Newmont dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara dan perusahaan tambang asing lainnya mengalami rintangan melalui ketidakpastian kebijakan pertambangan Indonesia. Kini, salah satu saham perusahaan tambang dengan produksi terbesar di seluruh dunia sepenuhnya menjadi milik Medco Energy Indonesia dengan mengganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori dan tiga konsep. Untuk teori penulis menggunakan Teori Pembangunan dan Teori Analisa Kebijakan Publik. Untuk konsep penulis menggunakan konsep-konsep seperti *FDI (Foreign Direct Investment)*, *OLI (Ownership, Localization, Internationalization)* dan *MNC (Multi-national Corporation)*. Teori dan konsep ini digunakan untuk mengkolaborasikan kondisi negara berkembang dengan kebijakan pemerintah melalui bantuan investasi dari negara yang lebih maju.

Teori Pembangunan oleh Rostow berasal dari konsep modernisasi yang merupakan penjelasan dari perubahan sosial. Terdapat dua hal yang menjadi fokus dari teori ini, yaitu adalah *frequent social change* atau perubahan sosial yang berkala dan *development* atau pembangunan. Teori ini juga digabungkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui tahapan-tahapan dalam *The Economic Growth* yang memandang pertumbuhan secara linear. Terdapat 5 tahapan, tahap pertama *The Traditional Society* dimana sistem ekonomi dikuasai

sektor agrikultur dengan cara pengolahan yang masih tradisional dan tingkat produksi masih rendah.

Tahap kedua, *The Preconditions for Take-Off*, pertumbuhan semakin dinamis dimana sudah lebih banyak investasi dan merupakan masa dari revolusi industri yang membutuhkan pertumbuhan agrikultur dan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak untuk mendukung kegiatan produksi. Tahap ketiga, *Take Off*, dimana kondisi ekonomi semakin dinamis, industri, tabungan dan investasi semakin meningkat dan membantu dalam membangun ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Tahap keempat, *Drive to Maturity*, dimana industri-industri semakin dewasa dalam memproduksi teknologi seperti elektronik atau komputer hingga menjadi langkah untuk ekspansi produk, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin membaik disini. Tahap kelima, *The Age of High Mass Consumption* dimana merupakan langkah terakhir dari teori ini yang menggambarkan sebagian besar dari masyarakat hidup dengan kondisi ekonomi yang baik, contohnya adalah negara-negara yang ada di barat atau utara.²³

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan Teori Pembangunan pada tahapan *Take Off*, dimana kondisi ekonomi semakin dinamis, dinamika industri, tabungan dan investasi semakin meningkat dan membantu dalam membangun ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua tipe sosial yang berbeda, tipe pertama adalah membutuhkan perubahan besar terhadap kondisi

²³ Dr. Jhon Gow, "Development Theory: Rostow's Five-Stage Model of Development and 1st Relevance In Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts The University of Newcastle
<https://pdfs.semanticscholar.org/89da/96a65d5cda93fdbb0798d95d290ffa35fedc.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

struktur sosial dan politik dan juga nilai sosial yang lebih efektif. Tipe kedua kondisi didorong oleh proses ekonomi. Hal ini distimulasikan karena revolusi politik negara sehingga memicu industri-industri untuk berinovasi dalam menggunakan teknologi.²⁴

Menurut Teori Kebijakan oleh Willam N. Dunn, terdapat siklus yang digambarkan dengan model kerangka. Pertama, dalam kerangka Teori Analisa Kebijakan Publik terdapat *Policy Problems* yang merupakan isu yang tidak disadari, nilai dan kesempatan sebagai pengetahuan untuk memperbaiki dan mencapai sesuatu melalui *public action*. Kedua, *Expected Policy Outcomes*, merupakan konsekuensi dari satu atau lebih kebijakan alternatif yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah. Tahap ini merupakan tahap untuk membayangkan kejadian yang ditimbulkan dari kebijakan yang dibuat.²⁵

Ketiga, *Preferred Policies*, yaitu kebijakan sebagai solusi dari masalah. Kebijakan yang sudah dibuat tidak hanya menyelesaikan masalah tertentu, tetapi juga mengangkat nilai, keuntungan dan efisiensi dari kebijakan. Keempat, *Observed Policy Outcomes*, melihat atau mengobservasi dampak dari implementasi *Preferred Policy* baik di masa kini maupun masa lalu. Kelima, *Policy Performance*, yaitu hasil kebijakan dapat berkontribusi terhadap masalah, sehingga timbul pertanyaan seperti: apakah kebijakan yang sudah dibuat dapat

²⁴ W. W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Third Edition, 36-40, Chapter 4: Take-Off, Cambridge University Press (Cambridge:1990), https://books.google.co.id/books?id=yZNwKHku4UoC&pg=PA36&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false, diakses pada tanggal 2 Oktober 2019.

²⁵ Dunn, *Public Policy Analysis*, Pearson New International Edition, (Essex:2014), Pearson, Hal. 5-8, file:///Users/premiereshouse/Downloads/Public_Policy_Analysis_Dunn_Fifth_Editio.pdf, diakses pada tanggal 27 November 2019.

menangani isu dan memberikan manfaat-manfaat yang sepadan, termasuk dampak jangka pendek maupun panjang? Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, sehingga ada yang bisa menyelesaikan masalah dan ada juga yang tidak.²⁶

Untuk mengaitkan poin-poin tahapan Teori Kebijakan oleh William N. Dunn, terdapat metode analisa. Pertama, *Problem Structuring*, merupakan cara yang digunakan untuk membuat informasi mengenai masalah yang perlu diselesaikan. Hal ini mengaitkan *Observed Policy Outcomes* yang merupakan pengamatan terhadap kebijakan masa kini atau masa lalu untuk mengetahui *Policy Problems*. Kedua, *Forecasting*, merupakan suatu cara supaya *Policy Problems* dapat menemukan informasi mengenai *Expected Policy Outcomes*. Ketiga, *Prescription*, dari *Expected Policy Outcomes* muncul sebuah rekomendasi untuk menemukan kebijakan yang diharapkan pada *Preffered Policy*. Keempat, *Monitoring*, yaitu mengawasi hasil dari kebijakan atau *Preffered Policy* untuk diobservasi yang merupakan *Observed Outcomes*. Kelima adalah *Evaluation*, metode ini digunakan untuk mengamati nilai dan kegunaan yang terkandung dalam suatu kebijakan ketika diobservasi, seperti *Policy Performance* dan *Expected Policy Outcomes*.²⁷

Teori Siklus Kebijakan membahas mengenai proses menganalisa kebijakan yang tidak secara linear. Proses ini dimulai dengan perumusan masalah dari hasil observasi kebijakan pada masa lalu dan masa sekarang. Hasil

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

perumusan masalah kebijakan digunakan untuk meramal atau membayangkan kebijakan yang diharapkan sehingga dari kebijakan yang diharapkan tersebut memunculkan solusi kebijakan yang sudah sesuai dengan manfaat yang sepadan termasuk dampak jangka pendek atau panjang. Solusi kebijakan kemudian diobservasi. Dari hasil observasi tersebut maka akan memunculkan perumusan masalah yang baru. Selanjutnya adalah evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan harapan dan performa kebijakan. Teori ini disesuaikan dengan Teori Pembangunan sebagai langkah-langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang merupakan dari implikasi situasi ekonomi dan politik yang sedang berlangsung.

Pendekatan pertama adalah konsep *FDI (Foreign Direct Investment)*. *FDI* ini merupakan bagian dari teori Ekonomi Neo-Klasik. Pada pengertiannya, teori ini selalu bersinggungan dengan penawaran dan permintaan untuk memaksimalkan profit. Teori ini dicetus oleh William Stanley Jevons, Karl Menger dan Léon Walras pada Abad 19 untuk menengahi kritik antara pandangan ekonomi klasik dengan pandangan Marx. Berdasarkan buku Pengantar Ekonomi Makro karya N. Gregory Mankiw, pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya didukung dengan tabungan negara saja melainkan juga dengan modal asing. Sehingga kita ketahui bahwa investasi asing merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.²⁸

²⁸ Mankiw, N. Gregory, “*Pengantar Ekonomi Makro*”, Asian Edition, Vol. 2, (London: Harvard University, CENGAGE Learning, 2008, hlm. 53-55.

Di satu sisi, tiap penanaman investasi asing memiliki harapan agar mendapatkan keuntungannya kembali. Pada hakikatnya, investasi asing sebenarnya akan lebih menguntungkan bagi negara pemilik modal. Investasi asing tidak termasuk dalam PDB, karena bukan pendapatan langsung untuk negara melainkan untuk negara yang menginvestasikan di negara tujuan.

Situasi seperti ini, yaitu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negara berkembang menjadi rujukan para ahli ekonomi dalam menyarankan masuknya investasi asing ke dalam negara atau salah satunya dengan dibantu dengan Bank Dunia (organisasi internasional yang memperoleh dana dari negara maju seperti Amerika Serikat untuk meminjamkan kepada negara-negara berkembang). Dengan cara ini, pinjaman dari Bank Dunia dapat digunakan atau diinvestasikan dalam pembangunan infrastruktur dalam negara seperti sistem irigasi, pusat pendidikan, pembentukan jalan dan berbagai investasi lainnya.²⁹

Berangkat dari konsep *internationalization*, menurut Dunning, terdapat tiga syarat internasionalisasi: *OLI (Ownership, Location, internationalization)*. *Ownership* bicara mengenai kemampuan menguasai pasar yang diperoleh dari kekuatan dan karakteristik pemilik modal. *Location* yaitu tempat baru yang lebih menguntungkan dari lokasi lama. Selanjutnya adalah *Internationalization*, yaitu arus perpindahan *FDI* harus dijalankan sesuai dengan logika internasionalisasi aktifitas *MNC*.³⁰

²⁹ *Ibid*

³⁰ John H. Dunning, "The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future", *International Journal of the Economics of Business*, Vol 8, Issue 2, DOI:10.1080/13571510110051441, (2001), hlm. 173-190.

Terdapat 4 karakteristik utama dalam *MNC* yaitu beroperasi di lebih dari dua negara (*host country*), sedangkan *home country* berasal dari negara aslinya supaya negara asal *MNC* dapat menciptakan strategi bisnis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan bisnis melalui *research and development*, lintas batas negara dan terjadi perpindahan *FDI*.³¹

Konsep *OLI* pada *MNC* ini juga erat kaitannya dengan *FDI* (*Foreign Direct Investment*) yang bertujuan untuk melakukan ekspansi dan melakukan integrasi vertikal. Pada umumnya, *MNC* memberikan kepemilikannya berupa fasilitas pada anak perusahaan seperti yang dikatakan oleh Spero dan Hart. *MNC* (*Multi National Corporation*) memiliki tujuan untuk melakukan ekspansi maupun perluasan cakupan eksistensi perusahaan tersebut di lebih dari satu negara. *MNC* erat kaitannya dengan *Comparative Advantage* yang merujuk pada dua hal yang berlawanan, yaitu anti-trade dan free-trade. *MNC* sendiri bergerak secara ekspansif untuk memaksimalkan profitnya. Berdasarkan *Location Theory*, *MNC* besar dalam negara maju menggunakan kesempatannya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yaitu menggunakan potensi di negara berkembang, dimana biaya yang dikenakan juga lebih murah.³²

Potensi melalui investasi di negara berkembang memiliki empat hal: bahan mentah, upah buruh murah, pasar yang masih dilindungi dan belum tersentuh, dan

³¹ Robert J. Carbaugh, “*International Economics*” 13th Edition, (Central Washington University, South Western CENGAGE Learning, 2011, hlm. 231 & 311.

³² Kuslivan. Salih, “*A Review of Theories of Multinational Enterprises*”, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:13, Sayı:1, (1998), hlm. 163-180, https://iibfdergi.deu.edu.tr/index.php/cilt1-sayi1/article/viewFile/24/pdf_10, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

biaya transportasi yang lebih murah. Apabila potensi-potensi tersebut tidak ada, maka pengoperasian dari *MNC* juga bisa terhambat.

Teori Pembangunan, Teori Kebijakan, Konsep *FDI*, *OLI* dan *MNC* merupakan kerangka pemikiran dari topik “Dinamika Ekonomi-Politik Indonesia dan Kebijakan Pertambangan Tahun 2009-2018. Studi Kasus: Newmont Mining Corporation”. Keterkaitan 2 teori dan 3 konsep tersebut ditunjukkan melalui Teori Pembangunan yang menggambarkan situasi dan kondisi domestik negara berkembang yang masih mengupayakan kemajuan ekonomi dengan bantuan investasi dari perusahaan negara maju.

Masuknya perusahaan asing ke negara berkembang tetap harus mendapatkan kontrol pemerintah melalui kebijakan agar tidak melampaui batas. Kebijakan juga menjadi alat bagi pemerintah untuk menangani isu-isu yang perlu diselesaikan. Sehingga, Teori Analisa Kebijakan Publik mendorong komponen-komponen dari lembaga negara untuk mendukung pembangunan domestik. Untuk menjelaskan perusahaan asing dari negara maju, penulis menggunakan konsep *FDI* sebagai alur masuknya investasi dari negara maju ke negara berkembang dimana terdapat hubungan yang saling menguntungkan antar kedua negara. Kemudian, *OLI* yang menjadi kesempatan bagi *MNC* melebarkan sayapnya melalui peluang bisnis. Terakhir, *MNC* yang menggambarkan karakteristik dari *MNC* itu sendiri.

1.6 Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam metode kualitatif terdapat tiga tahap pengumpulan data menurut John W. Cresswell, yaitu observasi, wawancara dan dokumen yang kemudian dianalisa untuk hasil yang bersifat deskriptif yang sesuai dengan kerangka pemikiran atau teori dan konsep.³³ Untuk menganalisa menurunnya kinerja Newmont Mining Corporation selama beroperasi di Indonesia yang disebabkan dinamika kondisi ekonomi politik dan kebijakan pertambangan tahun 2009-2018 adalah melalui studi kasus, yaitu dengan analisa komprehensif dari sebuah kasus.³⁴ Dari analisa tersebut, hasil data adalah data deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan ciri-ciri dan elemen dari sumber data yang didapatkan melalui studi pustaka, wawancara dan observasi.³⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen (buku, jurnal, *website*, laporan resmi), wawancara dan observasi.³⁶ Setelah data-data dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisa triangulasi data untuk

³³ Cresswell. John W, "Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches: Third Edition", hal. 32, (London:2009), Sage Publication.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bakry. Umar Suryadi, "Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional", hal.26-28 (Jakarta:2016), deepublish.
https://books.google.co.id/books?id=V7iEDwAAQBAJ&pg=PA27&lpg=PA27&dq=metode+pene-litian+hubungan+internasional+umar+bakry+preview&source=bl&ots=ZPPzFZ0iAD&sig=ACfU3U3B3BWnDpWOy2njxq9GwxmQXqyn6g&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj8yLvV-Y_mAhUGfX0KHSsuAFgQ6AEwCnoECAsQBA#v=onepage&q&f=false,

³⁶ *Ibid*, hal. 27-28.

menggabungkan atau mengkolaborasikan data-data yang sudah didapat untuk menjawab tujuan penelitian.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ini dimulai dari

Bab I membahas mulai dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data hingga sistematika penulisan.

Bab II berjudul “Faktor Ekonomi dan Politik yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Mengambil Kebijakan Pertambangan tahun 2009-2018”. Di dalam Bab II, penulis akan menjelaskan faktor-faktor tersebut mulai dari pemaparan kondisi ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor tambang di Indonesia, dan menjelaskan hubungan antara Newmont Corporation dengan Pemerintah Indonesia selama beroperasi di Batu Hijau, Sumbawa.

Bab III berjudul “Dinamika Kebijakan Pertambangan 2009-2018 terhadap Kinerja Newmont Mining Corporation di PT Newmont Nusa Tenggara. Pada Bab ini penulis dampak dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan pada Bab II terhadap dibuatnya kebijakan pertambangan yang dimana kebijakan pertambangan ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tambang asing, Newmont Mining Corporation. Selain itu, pada Bab III penulis juga memaparkan data hasil wawancara penulis kepada pihak Newmont mengenai tanggapannya terhadap

kebijakan pertambangan Indonesia tahun 2009-2018. Sehingga akhir dari Bab III merupakan analisa penulis (triangulasi data) dari data-data studi pustaka, wawancara, observasi.

Bab IV menjelaskan kesimpulan atau jawaban dari pembatasan masalah untuk mencapai tujuan penelitian ini.